

**KANTOR
BTKLPP KELAS I MANADO**

LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2022

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor BTKLPP Kelas I Manado adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor BTKLPP Kelas I Manado mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor BTKLPP Kelas I Manado. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Manado, Januari 2023

Kepala BTKLPP Kelas 1 Manado



Dr. Pijok M. Pijoh, MPH
NIP.197102082001122003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
F. Pengungkapan Penting Lainnya	52

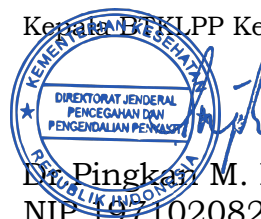
KANTOR BTKLPP KELAS I MANADO
JL. TUGU ADIPURA LINGK.X KEL.PANIKI BAWAH MAPANGET MANADO
TELEPON 0431-818150/818148, FAXIMILE 0431-818148

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor BTKLPP Kelas I Manado yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manado, Januari 2023
Kepala BTKLPP Kelas 1 Manado



Dr. Pingkan M. Pijoh, MPHIM
NIP.197102082001122003

Laporan Keuangan Kantor BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2022 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 359,367,010 atau mencapai 55 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp650.000.000.

Realisasi Belanja Negara jumlah Neto pada TA 2022 adalah sebesar Rp19.420.393.370 atau mencapai 92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp21,189,229,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 38,050,975,436 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 7,653,083,966; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 30,395,185,220; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 2,706,250

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 38,050,975,436

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 357,296,860, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 18,897,043,937 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (18,539,747,077). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp (18,537,676,927) dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (18,537,676,927).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp 35,083,437,684 dikurangi Defisit-LO sebesar (18,515,491,859) koreksi-koreksi senilai (2,873,929) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 21,485,903,540 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp 38,050,975,436

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR BTKLPP KELAS I MANADO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	655,000,000	359,367,010	55.00	239,941,243
JUMLAH PENDAPATAN		655,000,000	359,367,010	54.87	239,941,243
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	7,259,945,000	6,120,208,669	84.30	5,762,884,588
Belanja Barang	B.4	7,982,284,000	7,420,303,877	92.96	21,953,148,792
Belanja Modal	B.5	5,947,000,000	5,879,880,824	98.87	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6				
JUMLAH BELANJA		21,189,229,000	19,420,393,370	91.65	27,716,033,380

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR BTKLPP KELAS I MANADO NERACA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.10	7,653,083,966	5,280,796,493
Jumlah Aset Lancar		7,653,083,966	5,280,796,493
ASET TETAP			
Tanah	C.14	5,159,455,000	5,159,455,000
Peralatan dan Mesin	C.15	39,783,214,497	39,783,214,497
Gedung dan Bangunan	C.16	15,980,451,847	10,100,571,023
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	5,500,000	5,500,000
Aset Tetap Lainnya	C.18	42,213,600	42,213,600
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(30,575,649,724)	(27,640,455,909)
Jumlah Aset Tetap		30,395,185,220	27,450,498,211
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	4,500,000	4,500,000
Aset Lain-Lain	C.22	4,016,736,515	4,016,736,515
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(4,018,530,265)	(3,991,775,377)
Jumlah Aset Lainnya		2,706,250	29,461,138
JUMLAH ASET		38,050,975,436	32,760,755,842
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	22,185,068	42,102,253
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		22,185,068	42,102,253
JUMLAH KEWAJIBAN		22,185,068	42,102,253
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	38,028,790,368	35,083,437,684
JUMLAH EKUITAS		38,028,790,368	35,083,437,684
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		38,050,975,436	35,125,539,937

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR BTKLPP KELAS I MANADO LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	357,296,860	239,941,243
JUMLAH PENDAPATAN		357,296,860	239,941,243
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6,120,208,669	5,762,884,588
Beban Persediaan	D.3	2,506,002,902	14,343,446,788
Beban Barang dan Jasa	D.4	4,516,357,586	3,108,350,988
Beban Pemeliharaan	D.5	681,808,266	986,571,402
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2,116,891,740	1,661,645,028
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2,955,774,774	3,522,820,565
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		18,897,043,937	29,385,719,359
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(18,539,747,077)	(29,145,778,116)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Defisit Selisih Kurs			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2,070,150	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(18,537,676,927)	(29,145,778,116)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR BTKLPP KELAS I MANADO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	35,083,437,684	29,515,143,645
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(18,537,676,927)	(29,145,778,116)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI ATAS REKLAFIKASI	E.3.5	-	(16,169,058)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.6	(2,873,929)	-
JUMLAH		(2,873,929)	(16,169,058)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	21,485,903,540	34,730,241,213
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		2,945,352,684	5,568,294,039
EKUITAS AKHIR	E.5	38,028,790,368	35,083,437,684

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor BTKLPP

Kelas I Manado

Dasar

Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

Kantor BTKLPP Kelas I Manado didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Permenkes Nomor 2349/Menkes/PER/XI/2011 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit. BTKLPP Kelas I Manado mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) di bidang pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta kesehatan mata.

Kantor BTKLPP Kelas I Manado mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor BTKLPP Kelas I Manado berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui***

akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.” Untuk

mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor BTKLPP Kelas I Manado. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor BTKLPP Kelas I Manado menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor BTKLPP Kelas I Manado dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor BTKLPP Kelas I Manado. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor BTKLPP Kelas I Manado adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini
- diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2017 tentang

Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh

tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor BTKLPP Kelas I Manado telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Pendapatan dan Jenis Belanja Tahun 2022

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	655,000,000	655,000,000
Pendapatan Lain-lain	0	0
Jumlah Pendapatan	655,000,000	655,000,000
Belanja		
Belanja Pegawai	7,259,945,000	7,259,945,000
Belanja Barang	7,982,284,000	7,982,284,000
Belanja Modal	5,947,000,000	5,947,000,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	21,189,229,000	21,189,229,000

Realisasi

Pendapatan

Rp359.367.010

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 359.367.010 atau 55 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp655.000.000. Pendapatan Kantor BTKLPP Kelas I Manado terdiri dari

Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	655,000,000	359,367,010	54.87
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	655,000,000	359,367,010	54.87

- Realisasi Pendapatan Jasa TA 2022 mengalami kenaikan sampai 50 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan oleh kelancaran pemeriksaan Laboratorium Udara, Biologi dan Kimia Air karena pemerintah sudah mencabut status PPKM Covid 19.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

URAIAN	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	359,367,010	239,941,243	49.77
Pendapatan Lain-lain	-	-	0.00
Jumlah	359,367,010	239,941,243	49.77

Realisasi Belanja Negara

Rp 19.420.393.370

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2022 adalah sebesar Rp 19.420.393.370 atau 92 persen dari anggaran belanja sebesar Rp21.189.229.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	7,259,945,000	6,120,208,669	84.30
Belanja Barang	7,982,284,000	7,420,303,877	92.96
Belanja Modal	5,947,000,000	5,879,880,824	98.87
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	21,189,229,000	19,420,393,370	91.65
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	21,189,229,000	19,420,393,370	91.65

Dibandingkan dengan TA 2021, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 29% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengadaan alat penunjang alat-alat penunjang Lab. Virologi Covid 19 dan bahan-bahan pendukung lainnya dan sementara menunggu realisasi pengadaan renovasi gedung laboratorium.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6,120,208,669	5,762,884,588	6.20
Belanja Barang	7,420,303,877	21,953,148,792	(66.20)
Belanja Modal	5,879,880,824	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	19,420,393,370	27,716,033,380	(29.93)

Belanja Pegawai

Rp6.120.208.669

B.3 Belanja Pegawai

1. Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 DAN 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 6,120,208,669 dan Rp 5,762,884,588. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas

pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 6.20 persen dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain ada penambahan pegawai baru PNS dan PPPK.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,987,246,093	3,098,844,776	(3.60)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS/PPPK	56,651,036	0	
Belanja Honorarium	0	0	
Belanja Lembur	30,981,000	29,957,000	3.42
Belanja Tunjangan khusus	3,046,620,640	2,634,082,812	15.66
Jumlah Belanja Kotor	6,121,498,769	5,762,884,588	6.22
Pengembalian Belanja Pegawai	1,290,100	555,000	132.45
Jumlah Belanja	6,120,208,669	5,762,884,588	6.20

*Belanja Barang
Rp7.420.303.877*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2022 DAN 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 7,420,303,877 dan Rp21,953,148,792. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 66.20 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini antara lain disebabkan penurunan pagu anggaran belanja barang persediaan.

Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2,322,655,421	1,576,375,176	47.34
Belanja Barang Non Operasional	717,262,937	402,606,719	78.15
Belanja Jasa	1,496,356,413	1,125,218,304	32.98
Belanja Pemeliharaan	677,631,266	560,244,304	20.95
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2,116,891,740	1,661,645,028	27.40
Belanja Barang Persediaan	89,506,100	16,627,059,261	(99.46)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	7,420,303,877	21,953,148,792	(66.20)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	7,420,303,877	21,953,148,792	(66.20)

Belanja Modal Rp

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2022 DAN 2021 adalah

Rp 5.879.880.824

masing-masing sebesar Rp.5.879.880.824 dan Rp 0 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk TA.2021 tidak ada perencanaan modal dan tidak mengusulkan untuk belanja modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A.2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,879,880,824		#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja Modal Lainnya			
Jumlah Belanja Kotor	5,879,880,824	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	5,879,880,824	0	#DIV/0!

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak ada Belanja Modal Tanah Pada Kantor BTKLPP Kelas I Manado TA 2022 dan TA 2021.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tidak ada realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin			#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp126,456,000. Tidak ada belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Pengembangan gedung dan bangunan	5,879,880,824	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0

Belanja Bantuan Sosial Rp 0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa

kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 dan
2021*

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Uang Tunai	-	-
Bank BERSAMA No.acc 82111286163	-	-
Jumlah	-	-

Kas dibendahara pengeluaran per 31 Desember 2022 sudah disetor ke kas negara. Tanggal 31 Desember 2022

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan TA 2022 dan TA 2021 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal

dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 DAN 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang PNBP Rp0

4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember TA 2022 dan TA 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0

5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 DAN 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau

kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 DAN 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp 0*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2022 DAN 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 DAN 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2022 DAN 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan

tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan
Rp7.653.083.966

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.7,653,083,966 dan Rp.7,645,580,588 . Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2022 DAN 2021

Jenis	TH 2022	TH 2021
Barang Konsumsi	7,224,646,246	7,241,219,268
Barang untuk Pemeliharaan	17,912,800	17,912,800
Suku Cadang	267,232,400	268,109,400
Barang Persediaan Lainnya Untuk dijual Masyarakat	-	-
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/ berjaga jaga	-	-
Bahan baku	135,924,720	110,971,320
Persediaan Lainnya	7,367,800	7,367,800
Jumlah	7,653,083,966	7,645,580,588

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan

Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 DAN 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp0*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 DAN 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah
Rp5.159.455.000*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor BTKLPP Kelas I Manado per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp5.159.455.000 dan Rp5.159.455.000. Tidak ada Kenaikan nilai aset tetap Tanah. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	5,159,455,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2022	5,159,455,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2022

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	6.162 m2	Jl.Tugu Adipura Lingk.X Kel.Paniki Bawah Manado	5.159.455.000
Jumlah			5.159.455.000

*Peralatan dan
Mesin
Rp39.783.214.497*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp39,783,214,497 dan Rp39,783,214,497,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	39,783,214,497
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Normalisasi aset	
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghapusan	
Saldo per 31 Desember 2022	39,783,214,497
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(29,245,046,330)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	10,538,168,167

*Gedung dan
Bangunan
Rp 15.980.451.847*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 DAN 2021 adalah Rp.15.980.451.847 dan Rp.10.100.571.023 ,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	10,100,571,023
Mutasi tambah:	5,879,880,824
Pengembangan gedung dan bangunan	
Mutasi kurang:	-
Koreksi nilai bangunan	-
Nilai Inventarisasi	-
Saldo per 31 Desember 2022	15,980,451,847
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(1,328,861,727)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	14,651,590,120

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp5.500.000*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.500.000 dan Rp5.500.000 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	5,500,000
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2022	5,500,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(1,741,667)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	3,758,333

*Aset Tetap
Lainnya
Rp42.213.600*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak

dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp42.213.600 dan Rp42.213.600. Aset tetap tersebut berupa buku untuk perpustakaan. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2022, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	42,213,600
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Desember 2022	42,213,600
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2022	0
Nilai Buku per 31 Desember 2022	42,213,600

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp27.640.455.909*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 DAN 2021 adalah masing-masing Rp.27,640,455,909 dan Rp.24,984,095,463. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	39,783,214,497	29,245,046,330	10,538,168,167
2	Gedung dan Bangunan	15,980,451,847	1,328,861,727	14,651,590,120
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5,500,000	1,741,667	3,758,333
4	Aset Tetap Lainnya	42,213,600		42,213,600
Akumulasi Penyusutan		55,811,379,944	30,575,649,724	25,235,730,220

Aset Tak Berwujud
Rp4.500.000

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp4.500.000 dan Rp4.500.000. Jenis aset Pengadaan Webside kantor BTKLPP Kelas I Manado. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain
Rp4.016.736.515

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp4,016,736,515 dan Rp4,016,736,515. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	4,016,736,515
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- BMN yang dihentikan	
- penghapusan BMN	
Saldo per 31 Desember 2022	4,016,736,515
Akumulasi Penyusutan	4,014,030,265
Nilai Buku per 31 Desember 2022	2,706,250

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.4.018.530.265*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp.4.018.530.265 dan dan Rp.3,991,775,377 . Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	4,500,000	0	0
Aset Lain-lain	4,016,736,515	0	4,016,736,515
Jumlah	4,021,236,515	0	4,016,736,515

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN Rp0*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2022 DAN 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal

pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp 22.185.068

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 DAN 2021 masing-masing sebesar Rp 22,185,068 dan Rp42,102,253 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja yang Masih Harus Dibayar	-	Beban langganan listrik
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	Beban langganan daya dan jasa lainnya
Total	-	

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 DAN 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0 dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas

C.28 Ekuitas

Rp38.050.975.436 Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp38.028.790.368 dan Rp35.083.437.684 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB **D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Rp357.296.860 **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 357,296,860 dan Rp239,941,243. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	357,296,860	239,941,243	49
Pendapatan Lain-lain	2,070,150	0	100
Jumlah	359,367,010	239,941,243	50

Pendapatan Jasa berasal dari pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi dibidang kesehatan serta pendapatan layanan pendidikan dan atau pelatihan. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain merupakan pendapatan pelepasan aset pemerintah.

Beban Pegawai **D.2 Beban Pegawai**

Rp6.120.208.669 Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.120.208.669 dan Rp5,762,884,588. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji PNS	2,985,955,993	2,163,125,600	38
Beban Gaji PPPK	56,651,036		
Beban Pembulatan Gaji	0	33,617	
Beban Tunjangan-tunjangan	0	935,685,559	(100)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,046,620,640	2,634,082,812	-
Beban Lembur	30,981,000	29,957,000	3
Jumlah	6,120,208,669	5,762,884,588	6

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp2.506.002.902 Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2021 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 2,506,002,902 dan Rp14,343,446,788 . Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 DAN 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	576,865,812	13,332,692,378	(96)
Beban Persediaan lainnya	29,243,180	989,259,000	
Beban Persediaan Bahan Baku	1,899,893,910	21,495,410	8,739
Beban Persediaan - Penanganan Pandemi COVID 19		-	#DIV/0!
Jumlah	2,506,002,902	14,343,446,788	(83)

Beban Barang dan Jasa
Rp4.516.357.586

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.516.357.586 dan Rp3,108,350,988. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	717,903,898	570,428,819	
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	276,261,327	141,548,824	95.17
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,265,000	616,900	753.46
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	173,438,000	228,568,000	(24.12)
Beban Barang Operasional	865,936,616	630,172,148	37.41
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	283,850,580	5,040,485	5531.41
Beban Barang Non Operasional	586,045,777	219,188,900	167.37
Beban Langganan Listrik	329,215,956	358,810,798	(8.25)
Beban Langganan Telepon	158,697,500	132,212,440	20.03
Beban Jasa Profesi	213,200,849		#DIV/0!
Beban Jasa Lainnya	558,863,753	363,173,395	53.88
Beban Sewa	183,655,000	237,615,000	(22.71)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	9,638,000	26,708,000	(63.91)
Beban Bahan	123,367,160	183,417,819	(32.74)
Beban Honor Output Kegiatan	7,850,000		#DIV/0!
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	23,168,170	10,849,460	113.54
Jumlah	4,516,357,586	3,108,350,988	45.30

D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp681.808.266*

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp681,808,266 dan Rp986,571,402. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Pada tahun 2022 terjadi penurunan beban pemeliharaan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 DAN 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 DAN 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	537,684,525.	422,438,865.	27.28
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	139,946,741.	137,805,439.	1.55
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	0.	945,300.	(100.00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan bangur	3,300,000.		
Beban Persediaan suku cadang	877,000.	425,381,798.	(99.79)
Jumlah	681,808,266	986,571,402	(30.89)

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp2.116.891.740*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 2,116,891,740 dan Rp1,661,645,028. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh adanya berkurangnya angka kasus pandemi covid19 sehingga program-program luar kota dapat terlaksana. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 DAN 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1,960,641,740	1,488,545,028	31.72
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa			
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	156,250,000	173,100,000	-9.73
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			
Jumlah	2,116,891,740	1,661,645,028	27.40

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp2.955.774.774

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 2,955,774,774 dan Rp3,522,820,565. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan

untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 DAN 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2022 dan 2021*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,649,908,908.	3,263,926,783.	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	278,927,644.	211,626,086.	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	183,334.	183,334.	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang tdk digunakan	25,629,888.		
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	45,959,362.	-
Jumlah Penyusutan	2,954,649,774	3,521,695,565	-
Beban Amortisasi Software	1,125,000	1,125,000	-
Beban Penyusutan aset lain-lain			-
Jumlah Amortisasi	1,125,000	1,125,000	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,955,774,774	3,522,820,565	-

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp2.070.150*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan pelepasan aset non lancar	1,700,100		
Pendapatan kegiatan non oprasional lainnya			
Beban kegiatan non operasional lainnya	370,050		
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	2,070,150	0	

Pos Luar Biasa **D.13 Pos Luar Biasa**

Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal **E.1 Ekuitas Awal**

Rp35.083.437.684

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 DAN 2021 adalah masing-masing sebesar Rp35,083,437,684 dan Rp29,515,143,645.

Defisit LO **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Rp18.515.491.859

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 DAN 2021 adalah sebesar Rp18,515,491,859 dan Rp29,145,778,116. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Aset

Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan

hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap
Rp0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp2.873.929*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp2.873.929 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-
Lain Rp0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi

Antar Entitas

Rp21.485.903.540

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.21.485.903.540 dan Rp.34,300,241,213. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(359,367,010)
Ditagihkan ke Entitas Lain	19,420,393,370
Transfer Masuk	2,424,877,180
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	21,485,903,540

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar (Rp.359.367.010) sedangkan DKEL sebesar Rp19.420.393.370

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan

BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 2,424,877,180 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Barang Konsumsi	BBTKLPP Jakarta	85,800,000
2	Persediaan Lainnya	Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan & Sumber Daya Kesehatan	29,243,180
3	Barang Konsumsi	Direktorat SKK	414,956,690
4	Bahan Baku	Direktorat SKK	1,577,310
5	Bahan Baku	BBTKLPP Yogyakarta	1,893,300,000
	Jumlah		2,424,877,180

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pada satker BTKLPP Kelas 1 Manado tidak terdapat hibah langsung

Ekuitas Akhir
Rp38.050.975.436

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 38,028,790,368 dan Rp35,083,437,684.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

- I. Dimasa pandemi Covid-19 ini maka terdapat akun belanja untuk penanganan Covid-19 yang berbasis

Laboratorium sebagai berikut ;

Akun	Program Kegiatan
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19
	- <i>Desinfeksi Area Kantor dan Sekitarnya</i>
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19
	- <i>Pembelian APD dan bahan pendukung pengiriman sampel covid 19</i>
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19
	- <i>Biaya Pengiriman Shipper Declaration (Shipdec)</i>
	- <i>Biaya Airway Bill (AWB) / SMU</i>